

PENGARUH SOSIALISASI GERAKAN MAHASISWA SPID TERHADAP PERKEMBANGAN KESETARAAN GENDER DI SURABAYA TAHUN 1997-2003

UMI NAJIBAH

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : uminajibah@gmail.com

Sri Mastuti Purwaningsih

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kekuatan otoritarian Orde Baru terhadap setiap kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat terutama pada eksistensi perempuan dan peranannya, ternyata telah mengakibatkan semakin terkungkungnya ruang gerak perempuan yang juga mendorong terjadinya praktik diskriminasi dan ketidakadilan hingga kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi baik dari lingkup keluarga maupun masyarakat. Melalui Solidaritas Perempuan Indonesia pro Demokrasi (SPID) yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia khususnya di Surabaya ternyata telah membawa pengaruh besar dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat, terutama yang berkaitan tentang perempuan dan gender.

Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh SPID terhadap isu perempuan di Surabaya; (2) Bagaimana pengaruh sosialisasi SPID terhadap perkembangan kesetaraan gender di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni proses heuristik yakni pengumpulan sumber yang didapatkan dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Perpustakaan Rumah Sejarah, Perpustakaan Stikosa, dan masih banyak lagi. Tahap kedua yaitu kritik sumber yakni melakukan pengujian dan verifikasi sumber yang didapat. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan data yang sudah diperoleh dan telah melewati proses verifikasi. Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian sejarah secara kronologis dan analitis sesuai tema penelitian.

Kata Kunci : Perempuan, Gender, Gerakan Mahasiswa, SPID, Orde Baru.

Abstract

The authoritarian power of Orde Baru on every policy that was applied to the community, especially on the existence of women and their roles, turned out to have increasingly confined women's space to encourage discrimination and injustice to the point where violence against women often occurred both from the family and community. Through the pro-democracy Indonesian Women's Solidarity (SPID) formed by Indonesian students, especially in Surabaya, it turned out to have had a big influence in overcoming problems in society, especially those relating to women and gender.

This research discusses about (1) How was the socialization carried out by SPID on the issue of women in Surabaya; (2) What is the effect of the SPID socialization on the development of gender equality in Surabaya. This research uses a historical research method which consists of four stages. The first stage is the collection of primary and secondary sources that obtained from the collection of Medayu Agung Library, Unesa Central Library, Stikosa Library, and many more. The second stage is source criticism, namely testing and verifying the sources obtained. The third stage is interpretation, which is interpreting data that has been obtained and has passed the verification process. The fourth stage is historiography, namely writing chronological and analytical results of historical research according to the research theme

Keywords: Women, Gender, Student Movement, SPID, Orde Baru

PENDAHULUAN

Kemunculan berbagai macam perjuangan yang mengatasnamakan isu perempuan telah mengalami pasang surut dan dinamika sendiri dalam sejarah perannya. Dimana perjuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan hak dan peran bagi perempuan dalam berbagai bidang. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa perempuan justru mengalami ketertinggalan dan ketidakberuntungan termasuk tanggungjawab patriarki yang juga terkesan mendiskriminasi.¹ Berdasarkan latar historisnya, perjuangan perempuan telah muncul bahkan sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya. Selain itu melalui pidatonya, presiden Soekarno juga sangat mendukung adanya perkembangan perempuan sebagai salah satu perjuangan nasional.² Akan tetapi seiring berjalannya masa Orde Baru, gerakan perempuan mulai mengalami domestikasi, segregasi dan depolitisasi oleh pemerintah. Hal ini diaktualisasikan melalui pembatasan peran dan wewenang mereka untuk mampu berkiprah diluar ranah keluarga.³ Akibatnya perempuan kian mengalami penurunan melalui partisipasinya dan kapabilitas untuk mendapatkan hak dan peran yang sama dengan laki-laki. Pembatasan tersebut juga mengakibatkan perempuan kian mengalami ketidakadilan, diskriminasi hingga kekerasan yang bahkan dilakukan oleh suami mereka sendiri. hal inilah yang kemudian menjadi pendorong kemunculan organisasi mahasiswa sayap perempuan yang diikenal dengan SPID (Solidaritas Perempuan Pro Demokrasi) untuk turut serta memberikan wawasan terhadap berbagai kalangan perempuan (ibu rumah tangga, aktivis, mahasiswa, buruh, dan Wanita Tuna Susila) tentang pentingnya gender, seks dan perannya dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Collective Action* oleh Sidney Tarrow. Dimana teori tersebut dianggap relevan dan realistis karena adanya konsep aksi massa atau gerakan kolektif yang dilakukan oleh SPID melalui sosialisasi gendernya terhadap sebagai hasil dari adanya skeptisme masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang dianggap belum dapat menyelesaikan problematika yang terjadi di Indonesia terutama hal-hal yang berkaitan tentang isu perempuan. Sehingga melalui teori tersebut, dapat diklasifikasikan beberapa indikator penelitian, diantaranya:

1. Kolektivitas orang yang bertindak secara bersama
2. Aksi melawan pemerintah melalui berbagai macam aksi dan sosialisasi yang diperuntukkan bagi golongan perempuan
3. Sosialisasi dan studi kasus kebijakan pemerintah tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

¹ Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan, *Gender dan Permasalahannya: Modul Pelatihan Analisis Gender*, Jakarta, 1998, hlm. 45

² Soekarno dalam Kongres Ibu, 1928

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yang digunakan oleh peneliti yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁴ Tahapan pertama adalah heuristik, dimana dilakukan pengumpulan data primer, maupun sekunder yang ditemukan di berbagai sumber. Adapun hasil sumber terdiri dari tesis dan skripsi dari mahasiswa lain, jurnal relevan, koran sezaman, majalah sezaman seperti: *Harian Surabaya Pos* keluaran tahun 1990, 1995, dan 1998, majalah *Liberty* keluaran tahun 1992, dan majalah *Sarinah* keluaran tahun 1994. Selain itu arsip-arsip kegiatan sosialisasi yang dilakukan organisasi SPID sejak tahun 1997-2003 dalam mengatasi isu perempuan juga berhasil dikumpulkan oleh peneliti, diantaranya: Konferensi Wilayah Koalisi Perempuan Jatim, Pelatihan Membangun Sistem Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan, Pelaksanaan Seminar Depolitisasi Gerakan Perempuan Indonesia, arsip pengorganisasian oleh anggota SPID dan masih banyak lagi dan masih banyak lagi.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber, peneliti melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan sumber yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan kritik intern dengan menemukan nilai dan bukti apa yang ada dalam penelitian tersebut sebelum dikategorikan sebagai penelitian yang shahih dan mendukung penulisan sejarah Sosial Politik yang terjadi pada masa Orde Baru terutama di Surabaya. Setelah dilakukan tahapan kritik, tahapan selanjutnya adalah interpretasi yakni dengan menganalisis makna dan keterkaitan atau hubungan antar fakta yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Melalui fakta-fakta yang telah diinterpretasikan diatas, dilakukan tahapan akhir penelitian oleh peneliti yakni proses penulisan sumber atau historiografi berupa tulisan sejarah sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sosialisasi SPID terhadap Isu Perempuan di Surabaya

1. Sosialisasi Kedudukan dan Peran Perempuan dalam lingkup Rumah Tangga

Ibu rumah tangga merupakan golongan perempuan yang memiliki tanggungjawab besar sebagai pengurus rumah tangga dan anak dalam keluarga. Sehingga berbagai macam problematika yang berkaitan tentang rumah tangga kerap kali terjadi. Implementasi program SPID yang ditujukan untuk para ibu rumah tangga adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan gender, seks dan kesehatan

³Liza Hafidz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, LP3ES, Jakarta, 2004, hlm 424

⁴ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, Unesa Press, Surabaya, 2000, hlm10

reproduksi serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pelaksanaan sosialisasi ini sendiri bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman bagi para perempuan dan ibu rumah tangga akan pentingnya wawasan tentang gender, seks, serta pelatihan penanganan korban kekerasan tersebut berlokasi di lingkungan basis lembaga SPID itu sendiri yang terletak di kawasan perumahan Bratang I/e, Surabaya. Berikut merupakan materi yang diberikan dalam pelatihan dan sosialisasi terhadap ibu rumah tangga: 1) Pendidikan Pendidikan gender dan seks dalam keluarga pada 01-02-2001; 2) Pendidikan tentang analisis kekerasan dalam perempuan pada 08-02-2001; 3) Sosialisasi tentang hukum-hukum yang menaungi kekerasan dalam perempuan pada 15-02-2001); 4) Pelatihan penanggulangan korban kekerasan pada perempuan yang baik dan masih banyak lagi.⁵

Disamping memberikan sosialisasi secara umum, SPID juga terlibat langsung dalam penyelesaian masalah salah seorang ibu rumah tangga secara partikular atau khusus dan bertindak sebagai konsulta atau penasehat kepada beberapa ibu rumah tangga yang saat itu tengah mengalami permasalahan terhadap kesehatan reproduksi dan seks dalam keluarga. Sehingga pendekatan partikular juga dilakukan oleh SPID dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh kaum ibu. Salah satu pendekatan lain yang juga dilakukan oleh SPID yaitu turut serta dan berpartisipasi sebagai narasumber tetap pada RRI Cabang Surabaya dalam siaran segmen “Pilar Informasi Keluarga” yang dilakukan tiap minggunya pada April 2002. Melalui keikutsertaan tersebut, telah memberikan kemudahan bagi keanggotaan SPID untuk mengkampanyekan programnya terkait gender agar mampu didengar oleh masyarakat umum terutama ibu rumah tangga. Sehingga penyadaran yang telah dilakukan melalui media radio ini dapat dikatakan efektif dan dianggap berhasil. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya respon masyarakat yang turut serta berpendapat saat siaran radio berlangsung.⁶

2. Diskusi dan Seminar Isu Perempuan bersama Kalangan Intelektual Lain

Kebijakan Orde Baru yang awalnya memberikan batasan ruang gerak bagi berbagai gerakan mahasiswa mulai mengalami perubahan seiring dengan masa peralihan pemerintahan Orde Baru menuju Reformasi, dimana banyak berbagai macam organisasi-organisasi mahasiswa yang beraliran sosial hingga politik mulai menunjukkan eksistensinya. Salah satunya SPID, organisasi yang sebagai organisasi bawah tanah atau *Onderbouw* tersebut mulai menunjukkan eksistensinya melalui program-program sosialisasinya terkait isu perempuan ke ranah yang lebih luas kepada publik dan menyebar dikalangan mahasiswa, aktivis, hingga organisasi-organisasi lain di wilayah Surabaya dan

sekitarnya. Berbagai diskusi dan seminar kerap kali dilakukan oleh SPID bersama organisasi-organisasi sosial lain diantaranya : 1) Konferensi Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia JATIM pada November 2000; 2) Pelatihan Membangun Sistem Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan pada 14-18 Februari 2001; 3) Seminar “Depolitisasi Gerakan Perempuan di Indonesia” pada 29 September 2001; 4) Kampanye dan Peringatan 4 Tahun Penculikan Aktivis Pro Demokrasi pada 28 Maret 2002.⁷

3. Pengerahan Massa untuk Memperjuangkan Hak Buruh Perempuan dalam Lingkungan Kerja

Dalam mengangkat isu-isu perempuan, perjuangan dan sosialisasi untuk mendapatkan hak dan perlindungan bagi mereka terutama dalam ranah pekerja juga telah menjadi agenda utama yang tidak pernah terlewatkan oleh SPID. Isu perempuan yang acap kali didengarkan oleh gerakan mahasiswa tersebut semakin menguat seiring dengan banyaknya fenomena ketimpangan yang dialami oleh buruh perempuan, seperti adanya praktik diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang sangat merugikan mereka. Ketimpangan-ketimpangan tersebut berakibat panjang pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja, terutama pada buruh perempuan yang memiliki prospek kerja yang sama dengan buruh laki-laki akan tetapi untuk upah yang diterima hanya berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)⁸. Oleh karena itu, keterlaksanaan program SPID dikalangan para buruh dilakukan dengan tujuan untuk menentang adanya eksploitasi dan ketidakadilan terhadap porsi pekerjaan serta pemberian upah terutama yang dialami buruh perempuan. Usaha SPID bersama para buruh tersebut tertuang dalam aksi turun jalan yang dilakukan pada Maret 2000. Dalam aksi dan orasi yang dilakukan di depan gedung Graha/taman Apsari (sekarang Jl. Gubernur Suryo) tersebut, SPID melayangkan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh perempuan, seperti adanya hak perlindungan, hak menyusui, hak cuti hamil, melahirkan dan masih banyak lagi.

4. Sosialisasi dan Penyadaran Gender dan Seks terhadap Wanita Tuna Susila Jalanan

Semakin meluasnya wilayah cakupan sosialisasi SPID yang dilakukan di Surabaya dan sekitarnya, pada perkembangan selanjutnya, SPID tidak hanya memberikan sosialisasi dan penyadaran terhadap golongan perempuan dalam ranah rumah tangga, buruh maupun organisasi lain. Unikinya, sosialisasi juga dilakukan terhadap perempuan-perempuan pekerja seks atau WTS (Wanita Tuna Susila) yang tersebar diberbagai wilayah di Surabaya. Adapun tujuan diberikannya sosialisasi dikalangan pekerja komersial tersebut karena dengan profesinya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), justru tidak sedikit dari mereka mengalami

⁵ Diolah dari arsip materi kegiatan sosialisasi SPID di kawasan perumahan Bratang I/e, Surabaya pada Februari 2001

⁶ Ita Puspita Sari, ketua Departemen Pendidikan SPID, wawancara, 8 Agustus 2019

⁷ Diolah dari akumulasi arsip kegiatan diskusi dan sosialisasi SPID bersama organisasi lain

⁸ Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menentukan jumlah minimum pekerja yang dibutuhkan selama satu bulan berkaitan dengan kondisi fisiknya dalam melakukan pekerjaan.

tindakan yang dapat didefinisikan sebagai pelanggaran HAM seperti penipuan, tindakan sadisme dan penganiayaan, penjam-bakan yang mengarah pada perbudakan (*human slaving*) hingga perdagangan manusia (*human trafficking*). Bahkan kekerasan tersebut dapat berakibat fatal yang berakibat pada penyakit yang mematikan yakni berupa penularan penyakit seksual seperti HIV/AIDS maupun penyakit seksual lain yang membahayakan. Sehingga melalui programnya, SPID mencoba melakukan sosialisasi, penyadaran dan penyelesaian masalah yang dialami oleh para pekerja tersebut. Beberapa sosialisasi dan penyadaran telah dilakukan oleh SPID termasuk adalah melakukan sosialisasi dan diskusi penyelesaian masalah yang di hadapi oleh mereka. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan terhadap salah satu pekerja (ibu Mita) akan masalah yang dihadapinya yakni kehamilan dan kesehatan reproduksinya⁹. Melalui sosialisasi tersebut, dilakukan beberapa kali pertemuan oleh SPID bersama ibu Mita untuk mengetahui masalah yang dialami dan mencari penyelesaian masalah secara bersama.

Selain melakukan pendekatan dan penyelesaian masalah secara partikular seperti halnya yang dilakukan kepada ibu Mita, salah satu bentuk sosialisasi yang juga dibuat oleh SPID adalah melalui penyebaran brosur-brosur kampanye tentang pentingnya kesehatan tubuh. Brosur tersebut kemudian disebar-kan kepada masyarakat secara luas khususnya bagi para perempuan pekerja seks jalanan yang berada di wilayah Wonokromo dan Joyoboyo. Salah satunya adalah penyebaran brosur tentang kampanye penggunaan alat kontrasepsi saat berhubungan¹⁰. Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 November 1999 tersebut bersamaan dengan peringatan hari “Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan pada para pekerja akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi atau kondom sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap penyakit yang menular seperti HIV/AIDS, Sifilis, dan masih banyak lagi. Melalui seruannya yang tersirat dalam kampanye tersebut, SPID mengharapkan akan adanya keberanian oleh para pekerja seks tersebut untuk menolak pelanggaran yang sekiranya berujung pada kekerasan dan pelecehan seksual. Hal itu dikarenakan bahwa dimanapun perempuan, baik dalam lingkup rumah tangga, pekerjaan, pendidikan maupun pekerja seks jalanan, mereka sama-sama memiliki kedudukan yang sama dan berhak menolak serta menyatakan pendapatnya dalam masyarakat sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap diri kearah yang lebih baik.

B. Pengaruh Sosialisasi SPID Hasil Perubahan Kebijakan Terhadap Buruh Perempuan Di Surabaya

1. Pengaruh SPID Terhadap Perkembangan Perempuan di Surabaya

Tumbuh dan berkembangnya organisasi Solidaritas Perempuan Indonesia Pro Demokrasi (SPID) sejak tahun 1997, telah memberikan pengaruh besar bagi kemunculan organisasi-organisasi perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain di Surabaya. Pasalnya, organisasi yang dipelopori oleh aktivis mahasiswa cabang Surabaya dengan sasaran para kaum ibu yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat (Ibu rumah tangga, buruh bahkan pekerja seks) ternyata telah memberikan pandangan berbeda bagi perkembangan perempuan dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Sehingga kemunculan SPID ini dapat dikatakan berhasil memberikan inspirasi bagi perkembangan organisasi-organisasi perempuan pada periode berikutnya. Sebagai suatu organisasi gabungan mahasiswa, SPID turut berperan andil dalam pembentukan salah satu organisasi sosial- politik lain di Surabaya yang lebih dikenal dengan organisasi Samitra Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (SA-KPPD)¹¹.

Hampir sama dengan organisasi SPID yang pelopori oleh para aktivis mahasiswa dari beberapa kampus di Surabaya, keberadaan SA-KPPD sebagai lembaga sosial masyarakat juga mengusung isu- isu perempuan seperti memperjuangkan hak – hak perempuan, utamanya kebebasan dari segala bentuk kekerasan guna mewujudkan masyarakat sipil yang kuat, adil dan demokratis sebagai pokok kajian organisasi. Disamping itu, dalam programnya, SA-KPPD juga menyediakan layanan berupa konseling, pendampingan hukum hingga rujukan bagi perempuan maupun anak korban kekerasan serta melakukan pendidikan kesadaran gender dengan lingkup yang lebih terstruktur dan luas, yakni meliputi wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Keberadaan organisasi SPID maupun SA-KPPD sebagai lembaga sosial masyarakat yang fokus utamanya pada isu-isu perempuan menandakan bahwa perkembangan perempuan dengan segala fenomenanya kian mendapat perhatian publik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan programnya baik SPID maupun SA-KPPD bekerja sama dalam menangani permasalahan dengan melakukan penyadaran dan pendampingan-pendampingan kepada para perempuan dan anak terkait ketidakadilan, diskriminasi bahkan kekerasan yang dialami.

2. Hasil Perubahan Kebijakan Terhadap Buruh Perempuan Di Surabaya

a. Perubahan Kebijakan Sistem Upah

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan berbagai macam tatanan kebijakan yang dilakukan, salah satunya terhadap perubahan kebijakan ketenagakerjaan seperti upah, jam kerja, tunjangan kerja, keselamatan kerja, dll yang mulai diperbaharui meskipun

⁹Diolah dari arsip pengorganisasian SPID dan pendekatan masalah Ibu Mita, PSK asal Pare, Kediri (22 tahun) pada Maret 2002

¹⁰ Diolah dari arsip internal SPID tentang kampanye penggunaan alat kontrasepsi, November 1999.

¹¹E.Purwadi, S.H., Wawancara, 20 Agustus 2019, Salah satu Perintis SPID

pada esensinya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan pengupahan yang muncul pada periode ini yaitu Permenaker Nomor 01 Tahun 1999 tentang upah minimum menggantikan permenaker no. 03 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional yang berlakunya 2 tahun. Dalam Peraturan ini, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, dimana upah minimum terdiri dari : UMR Tingkat I, UMR Tingkat II, UMSR Tingkat I dan UMSR tingkat II.¹² Pada perkembangan selanjutnya. Peraturan menteri tersebut kemudian diperbaiki melalui Kepmenakertrans No: Kep-226/Men/2000 Tentang Perubahan Pasal-Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum.

Dalam perkembangannya, SPID tergolong sebagai organisasi radikal yang dianggap fokus perjuangannya hanya pada perempuan, akan tetapi dalam praktiknya SPID juga terlibat dalam berbagai peristiwa besar, seperti turun aksi buruh Sritex 1995. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi SPID masih tergolong terbatas kawasan pengkoordinasiannya yakni hanya terfokus pada kota Surabaya saja, akan tetapi melalui perjuangan-perjuangan terdahulunya telah mampu memberikan semangat para organisasi dan kelompok studi lain untuk turut serta turun ke jalan dalam berbagai macam aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia terutama tentang perjuangan isu perempuan.

b. Pengaruh Pengesahan UU No 13 tahun 2003 terhadap Buruh Perempuan

Buruh merupakan salah satu sasaran pendampingan bawah tanah yang dilakukan oleh keanggotaan SPID di Surabaya, dimana pada masa Orde Baru keberadaan buruh menjadi salah satu lapisan masyarakat yang seringkali diberikan konotasi negatif, ketidakadilan bahkan diskriminasi lapisan masyarakat oleh pemerintah, seperti dugaan akan adanya penyematan golongan “kiri” atau komunis dalam tubuh buruh. Oleh karena itu adanya penataan kembali pemerintahan Orde Baru pasca pemberantasan gerakan sayap kiri (PKI) kian gencar dilakukan oleh pemerintah terutama pada serikat buruh yang berkembang diberbagai wilayah Indonesia, seperti Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).¹³

a. Praktik ketidakadilan yang diterima oleh buruh tersebut terus berlanjut bahkan setelah pergantian pemerintahan Orde Baru menuju masa Reformasi yang masih menjadi tantangan besar khususnya bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seiring dengan adanya rentetan peristiwa yang melibatkan kaum buruh

tersebut, akhirnya pemerintah kemudian melakukan penataan kembali terkait kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan terutama buruh perempuan dan anak. Hal inilah kemudian dikeluarkannya Undang- Undang tentang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 sebagai suatu hasil positif dari perjuangan buruh selama ini. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan prioritas yang diterima oleh buruh perempuan. Seperti : 1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid;¹⁴ 2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan;¹⁵ 3) Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dan masih banyak lagi.¹⁶ Beberapa perubahan tersebut merupakan beberapa tuntutan yang diberikan oleh para aktivis perempuan melalui organisasinya termasuk SPID di wilayah Surabaya dalam perjuangannya menuntut hak buruh perempuan yang sejak masa Orde Baru selalu didengung-dengungkan agar mencapai suatu hasil yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi buruh perempuan. Sehingga dengan dicapainya sebuah kebijakan yang mengatur tentang ketenagakerjaan terutama buruh perempuan, telah memberikan keberhasilan dan kepuasan tersendiri bagi perjuangan organisasi mahasiswa maupun Lembaga Swadaya yang bergerak pada gerakan-gerakan isu perempuan menuju kearah yang lebih baik.

Melalui fenomena diatas menunjukkan bahwa perjuangan perempuan yang dilakukan pada masa Orde Baru merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat atas berbagai macam problematika yang menimpa perempuan terkait keterbatasan ruang gerak mereka dalam ranah publik terutama pada masa Orde Baru. Perjuangan SPID merupakan satu dari banyaknya perjuangan perempuan yang dipelopori oleh golongan pemuda utamanya mahasiswa di Surabaya untuk memberikan keleluasaan peran, kedudukan dan perlindungan bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan baik sebagai ibu rumah tangga hingga perempuan pekerja lain . Hal ini ditujukan untuk merubah pandangan masyarakat tentang konsepsi perempuan dan gender itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep sehingga perempuan tidak hanya ditempatkan dalam kungkungan dan batasan suami serta aturan yang mendiskriminasi saja. Selain itu, adanya fenomena ini dapat lebih membuka wawasan masyarakat akan gender dan emansipasi perempuan di era modern ini tanpa adanya konsepsi bahwa perempuan akan

¹²Permenakertrans Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum

¹³Soegiro DS & Edi Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*, Hasta Mitra, 2003, hlm 35-36. Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) merupakan serikat buruh tunggal yang diakui oleh pemerintah Orde Baru sebagai melalui pengukuhan yang diberikan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja. Serikat buruh yang didirikan pada 20 Februari 1973 tersebut diprakarsai

oleh Agus Sudono mantan presiden Gasbiindo. Akan tetapi karena adanya ketidakpercayaan pemerintah, akhirnya FBSI diganti menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi serikat buruh tunggal di Indonesia yang disahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

¹⁴UU Ketenagakerjaan No 13 Pasal 81

¹⁵UU Ketenagakerjaan No 13 Pasal 82

¹⁶ UU Ketenagakerjaan No 13 Pasal 83

mengalahkan kedudukan laki-laki. Akan tetapi justru perjuangan gender dan emansipasi perempuan akan memberikan mereka kesempatan dalam hal pendidikan, pekerjaan dan berperan dalam hampir seluruh bidang kehidupan yang bahkan dulu dianggap langka. Selain berperan sebagai pendamping suami, konsepsi istri sekarang jauh lebih luas. Sehingga wanita kini bukan lagi sosok yang sekadar *Surgo nunut neroko katut*.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Kemunculan gerakan sosial-politik mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia khususnya di Surabaya ternyata telah membawa pengaruh besar terhadap problematika dalam masyarakat, terutama permasalahan yang berkaitan tentang perempuan dan gender. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya wawasan akan gender telah mengkonstruksikan perempuan agar berperan dalam ranah domestik atau lingkup keluarga saja. Disamping itu, kekuatan patriarki yang kian melekat dalam masyarakat dan besarnya kuasa laki-laki terhadap perempuan baik dalam lingkup keluarga membuat peranan dan hak perempuan kian terdesak akan aturan-aturan yang mewajibkan mereka untuk tunduk dan mematuhi apapun yang telah diperintahkan tanpa adanya keinginan untuk melawan. Fenomena ini justru dapat memunculkan permasalahan baru, yakni sering terjadinya praktik diskriminasi bahkan kekerasan bagi perempuan yang tidak menurut dan terkesan melawan aturan yang telah ditetapkan. Peristiwa inipun masih dianggap lumrah dalam masyarakat karena masih adanya pemikiran bahwa "Perempuan yang baik adalah perempuan yang pendiam, anggun dan harus selalu tunduk pada aturan". Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, baik perempuan maupun laki-laki memang harus tunduk pada sistem. Akan tetapi jika sistem yang dibuat justru menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan hingga menimbulkan kekerasan terutama bagi perempuan, maka perjuangan gender perlu lebih digalakkan. Oleh karena itu perlu adanya penyadaran bagi masyarakat terutama kaum perempuan sendiri agar mampu memposisikan diri untuk tetap tunduk pada sistem tanpa melalui praktik diskriminasi ataupun kekerasan, selain itu adanya pengakuan hak dan peranan perempuan juga perlu digalakkan sebagai suatu kerberhasilan perjuangan kearah yang lebih baik.

Banyak sekali pesan moral dan nilai-nilai yang dapat diambil dari pembahasan ini. Berbeda dengan sekarang, kondisi perempuan dan keberadaannya dari dulu bahkan sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, masih dianggap sebagai sosok yang harus tunduk sekaligus menjadi sosok yang bertanggungjawab hanya pada urusan domestik. Melalui perjuangan-perjuangan terutama pada berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Melalui fenomena tersebut

diharapkan semakin membuka mata masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dan hak dari ketidakadilan bahkan diskriminasi sosial-politik bagi perempuan kerap kali terjadi. Sehingga di zaman yang serba modern ini, meskipun telah banyak gerakan-gerakan emansipasi yang dilakukan oleh perempuan tak terkecuali di Indonesia, akan tetapi, perlu diingat bahwa perempuan masih perlu diberikan perlindungan untuk mencapai emansipasi yang tidak hanya berkaitan dengan hak, kewajiban, peran dan karir baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, bangsa dan negara. Akan tetapi pemaknaan tentang peran kaum perempuan tidak serta merta menghilangkan pran kaum laki-laki juga perlu digalakkan agar tercipta suatu kondisi yang seimbang dalam pertalian tersebut.

DADFTAR PUSTAKA

A. Arsip & Dokumen

- Arsip Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 210-221 tahun 1997 tentang pembubaran Partai Rakyat Demokratik (PRD) beserta Organisasi yang bernaung dibawahnya.
- Arsip Internal logo SPID
- Arsip Laporan kerja pengorganisasian wanita tuna susila di kawasan Joyoboyo tahun 1999
- Arsip selebaran kampanye SPID tentang waspada terhadap reformis gadungan pada masa kabinet Gus Dur pada Juli 2000
- Arsip selebaran kampanye SPID tentang berhubungan seks yang aman menggunakan alat kontrasepsi pada November 1999
- Arsip Internal pelaksanaan sosialisasi terhadap kesehatan reproduksi dan kehamilan dan ibu rumah tangga dikawasan Bratang I/e pada Maret 2002
- Arsip Internal pelaksanaan seminar dan pelatihan pemulihan korban kekerasan yang diikuti oleh beberapa organisasi sosial dan perempuan di wilayah Surabaya dan sekitarnya pada Februari 2001
- Arsip internal jadwal siaran tetap sebagai narasumber gender di RRI Cabang Madya Surabaya pada Mei 2002

B. Wawancara

- Bapak Edi Puwadi, selaku salah satu perintis organisasi mahasiswa sayap perempuan SPID di Surabaya.
- Ibu Ita Puspita Sari, Selaku ketua dewan penalaran dan aksi SPID.

C. Surat Kabar/Koran

- Surabaya Post, *Porsi Kerja Wanita Sejajar Pria, Soal Gaji Masih Tanda Tanya*, 14 Oktober 1988
- Surabaya Post, *Langkah-Langkah Wanita Juru Kampanye*, 15 Juni 1992
- Surabaya Post, *Peraturan Perundangan Masih Diskriminatif terhadap Perempuan*, 15 Oktober 1995.

¹⁷ Dikutip dari Surabaya Post, *Wanita Kini Bukan Lagi Sosok yang Sekadar Surgo Nunut Neroko Katut*, 7 Desember 1998

Surabaya Post, *Wanita Kini Bukan Lagi Sosok yang Sekadar* "Surgu Nunut Neroko Katut", 7 Desember 1998

Majalah Sarinah, *Kaum Wanita Memperjuangkan Kemitraan Seajar*, 25 Juli 1994

D. Buku

Ali, Fachry. 1985. *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*. Jakarta : PT Inti Sarana Aksara

Armiwulan, Hesti & Dian Noeswantari. 2005. *Menggugat Hak Politik Perempuan*. Surabaya: Lutfansyah Mediatama

Eddyono, Sri Wiyanti. 2005. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kasdi, Aminuddin. 2000. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Press.

Liza, Hafidz. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3S

Murniati, A. Nunuk. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama dan Keluarga*. Magelang: Indonesia Tera

Murniati, A. Nunuk. P. 1992. *Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungannya*. Yogyakarta: Kanisius

Panca Dharwa *Wanita dalam Saskia Wieringa*. 1950. *Kuntil Anak Wangi: Organisasi Perempuan Indonesia Setelah Tahun 1950*. Jakarta: Kalyanamitra

Ridzal, Faudzie. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana

E. Jurnal

Subono, Nur Iman. *Tokoh Politik Perempuan di Asia*. Jurnal Perempuan

Booth, Anne. *The Indonesian Crisis of 1997-1999 and the Way Out: What are the Lessons of History?*, Lembaran Sejarah, Vol. 3 No.1, 2000, hlm. 12

Prijono, *Kebijakan Upah : Tantangan Di Tengah Suasana Krisis Ekonomi*, Jurnal populasi XIV (1), Bapennas, 2003, Hlm 10

F. Internet

Estu Rakhmi, *UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya*, (Online), diakses dari <http://ditjenpp.kemendikham.go.id>, pada 10 September 2019

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*, (Online), diakses dari <http://komnasperempuan.go.id>, pada 14 September 2019.

Hendri F. Isnaeni, *(Bukan) Perhiasan Perang*, (Online), diakses dari <http://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/politik/article/s/bukan-perhiasan-perang-p4nov>, pada 16 September 2019.

Prima Gumilang, *Kiamat Gerwani: Diburu Dibinasakan dari Pusat Hingga Daerah*, (Online), diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160928231847/kiamat-gerwani-diburu-dibinasakan-dari-pusat-hingga-daerah>, Pada 23 September 2019.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (Online), diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_Kesejahteraan_Keluarga_pada_23_September_2019.

